

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Sidang Skripsi Strata 1 pada
Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitaas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH:

ERINA FAHZIRA

11775201257

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

T.A 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan tugas, dan penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama : ERINA FAHZIRA
 NIM : 11772501257
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar

**DISETUJUI OLEH :
 DOSEN PEMBIMBING**

Mhd. Rafi, S.Sos., M.Si
 NIK. 130 411 027

MENGETAHUI :

DEKAN
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PROGRAM STUDI
 Ilmu Administrasi Negara



Dr. Hi. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ERINA FAHZIRA
 NIM : 11775201257
 PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN KAMPAR
 HARI/TANGGAL UJIAN : RABU, 17 NOVEMBER 2021

DISETUJUI OLEH :

KETUA PENGUJI

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA

NIP. 19790911 201101 1 003

PENGUJI I

Mashuri, MA

NIP. 19770721 201411 1 002

PENGUJI II

Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si

NIK. 130 712 074



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ERINA FAHZIRA
 NIM : 11775201257
 Tempat/Tgl. Lahir : BANGKINANG, 17 JUNI 1999
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :
 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERURAHAN STUMING
 DI KABUPATEN KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

15 DESEMBER 2021
 at pernyataan

 ERINA FAHZIRA
 NIM : 11775201257

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN KAMPAR

OLEH:

ERINA FAHZIRA

11775201257

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka stunting di Kabupaten Kampar sehingga Pemerintah membuat kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Kampar. Diharapkan dengan adanya implementasi kebijakan penurunan stunting bisa menekan angka stunting di Kabupaten Kampar. tetapi di dalam pelaksanaannya belum optimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penurunan stunting di kabupaten Model Konseptual menggunakan teori Edward III dari aspek; Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap Prlaksana, dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan datanya yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Kampar belum dapat berjalan maksimal, hal ini dibuktikan dengan belum terlaksananya aspek Komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi, dalam hal ini ada beberapa kendala dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di kabupaten adalah komunikasi terkait sosialisasi, tidak adanya tim khusus untuk melaksanakan kebijakan penurunan stunting sehingga tanggungjawab pegawai kurang dalam hal ini, masih kurangnya kesadaran masyarakat, kepemilikan tanah tidak berdomisili di Kampar.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penurunan Stunting

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat, keluarga serta pengikutnya.

Skripsi ini berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DIKABUPATEN KAMPAR”**. Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan peneliti. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi yang sederhana ini guna lebih bermanfaat dikemudian hari. Skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa Ayahanda H. Irfunia dan Ibunda Dewi Hastuti orang tua tercinta dan nenek tersayang Hj. Mardianis dan Bunda saya yang tersayang Dr. Ineng Suwarsih yang senantiasa menyertai ayunan langkah dengan iringan do'anya dan yang telah memberikan dukungan selama penulis mengerjakan tugas akhir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Yang terhormat Ibu Dr. Mahyarni, S.E, M.M selaku ketua Dekan, Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Yang terhormat Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
5. Yang terhormat Bapak Mhd. Rafi, S.Sos, M.Siselaku pembimbing, yang memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
6. Yang terhormat kepada seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Uin Suska Riau yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas ilmu-ilmu yang telah dibrikan selama kuliah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
7. Yang terhormat Bapak Rahmat, S.K.M, M.K.M selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
8. Yang terhormat Ibu Meldy Diani, Amd.Keb selaku Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat dan Dr. Ineng Suwarsih selaku Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bapak Dr. Erwan HerliTerima kasih atas segala bantuan selama penulis melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
9. Saudara yang penulis sayangi, Nurfadila Ulfa, Dwi Fhanni Asmen, M. Zidan dan yang lainnya yang telah banyak memberikan do'a, dukungan, cinta dan kasih sayang kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Teruntuk sahabat tercinta Nurlela, Via Sapira, Lia Mardiana, Sinta Aprilia, siti Khairunisa, Yelfi Maizella dan teman seperjuangan Rayhanul Afiq yang selalu ada dan kebersamai perjuangan mulai dari awal kuliah hingga saat ini.

11. Kepada setiap orang baik yang sudah berpartisipasi dalam proses pembuatan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan dengan kebaikan pula. *Aamiin ya rabbal alamin*

Akhir kata, penulis mohon maaf jika dalam penulisan tugas akhir ini banyak kekurangan, terutama dalam substansi penyusunan isi serta lampiran. Dengan hati lapang dada, penulis menerima saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini dimasa yang akan datang.

Pekanbaru, 05 Oktober 2021

Erina Fahzira

DAFTAR ISI

ABSTRAK		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		vii
DAFTAR GAMBAR		viii
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Rumusan Masalah	9
1.3.	Tujuan Penelitian.....	9
1.4.	Manfaat Penelitian.....	9
1.5.	Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	LANDASAN TEORI	
2.1.	Defenisi Kebijakan	12
2.2.	Kebijakan Kesehatan.....	13
2.3.	Sistem dan Komponen Kebijakan	14
2.4.	Implementasi Kebijakan	15
2.5.	Stratrgi Dinas Kesehatan	20
2.6.	Implementasi Kebijakan dan Program Stunting	28
2.7.	Pengertian Stunting	32
2.8.	Ciri-Ciri Stunting Pada Anak	33
2.9.	Dampak Masalah Stunting Pada Anak	34
2.10.	Cara Mencegah Stunting	35
2.11.	Pandangan Islam Terhadap Stunting.....	38
2.12.	Penelitian Terdahulu.....	39
2.13.	Kerangka Penelitian	40
2.14.	Konsep Operasional	41
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1.	Jenis dan Tipe Penelitian.....	42
3.2.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
3.3.	Jenis dan Sumber Data	44

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4. Teknik Pengumpulan Data	43
3.5. Informan Penelitian	44
3.6. Teknik Analisa Data	45

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1. Sejarah Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar	47
4.2. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar	47
4.3. Sejarah Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar	48
4.4. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar	50
4.5. Uraian Tugas Jabatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar	51

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Komunikasi	53
5.2 Sumber Daya	59
5.3 Diposisi dan Sikap Pelaksana	65
5.4 Struktur Birokrasi	67

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	71
6.1 Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Prevalensi Balita Stunting Provinsi Riau Tahun 2013 – 2019.	4
Tabel 1.2	Dasar Penetapan Kabupaten Kampar Sebagai Lokus Stunting Tahun 2019.....	4
Tabel 1.3	Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Kampar Tahun 2013 – 2019.....	5
Tabel 1.4	Persentase balita stunting di desa lokus Kabupaten Kampar Tahun 2020.....	6
Tabel 2.1.	Intervensi Gizi Spesifik Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i>	22
Tabel 2.2.	Intervensi Gizi Sensitif Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i>	23
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu	40
Tabel 2.3	Operasional Indikator Penelitian.....	41
Tabel 3.1	Daftar Informan.....	45
Tabel 4.1	Daftar Kecamatan di Kabupaten Kampar	48
Tabel 5.1	Rekapitulasi Sosialisasi Stunting	55

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Hubungan Komponen dalam Sistem Kebijakan.....	14
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran	34



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksanaan pemerintah dalam bidang kesehatan dan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian urusan daerah dalam bidang kesehatan untuk menunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan dan melakukan tugas pembantuan sesuai dengan bidangnya.

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya. (Mohammad, 2003).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan “ bahwa kesehatan ialah hak Asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pancasila dan UU Negara RI tahun 1945 “ Serta peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengawasan dibidang kesehatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya Kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi “ bahwa meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan komitmen global dan merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara Indonesia, bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus menerus “.

Permasalahan Gizi ialah permasalahan dalam siklus kehidupan yang sangat kompleks dan penting untuk segera ditangani hal ini dapat terjadi mulai dari bayi masih dalam kandungan, balita, remaja, bahkan sampai dengan lanjut usia. Masalah gizi dapat terjadi pada seluruh kelompok umur, permasalahan gizi pada satu kelompok umur tertentu akan berpengaruh pada status gizi pada periode siklus kehidupan berikutnya (Republik Indonesia 2012).

Indonesia mempunyai masalah Gizi yang cukup berat yang ditandai dengan banyaknya kasus gizi buruk pada anak balita. Balita pendek (stunting) adalah masalah kurang gizi kronis sehingga berdampak gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Akibatnya anak tumbuh lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berfikir.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Stunting merupakan masalah gizi utama yang akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Stunting juga dapat terjadi sejak janin dalam kandungan akibat masalah kurang asupan protein pada saat ibu sedang hamil juga dapat berpengaruh dari kondisi lingkungan. Masalah kurang energi protein (KEP) yaitu salah satu masalah utama gizi yang dapat berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak. Kekurangan energi dan protein dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan balita (Hardiansyah, et al, 1992).

Stunting merupakan permasalahan yang semakin banyak ditemukan di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia, masalah ini tergolong masalah yang serius. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan UNICEF terdapat 7,8 juta anak menderita stunting, dan Indonesia masuk ke dalam 5 besar Negara dengan jumlah anak yang mengalami stunting tinggi (UNICEF, 2007).

Pencegahan dan penanggulangan stunting membutuhkan upaya yang bersifat holistic dan saling terintegrasi. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 merupakan salah satu strategi dalam Scalling Up Nutrition (SUN) dengan melibatkan berbagai sektor yang harus disikapi dengan koordinasi yang kuat baik di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Diseminasi informasi dan advokasi kepada stakeholder dan pemangku kepentingan lain diberbagai lintas sektor pada tingkatan yang sama dan perlu dilakukan upaya pelatihan dan edukasi untuk jajaran struktural agar mampu menjelaskan dan melakukan pemberdayaan dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Selanjutnya, intervensi penting penguatan 1000 HPK yang menjadi bagian dari budaya di kehidupan sosial masyarakat, melakukan kursus singkat dalam pengetahuan dan pendidikan kepada ibu sebelum

kehamilan atau sebelum menjadi pengantin (calon pengantin) sebagai bekal ibu dalam kehamilan untuk menjaga tumbuh kembang kognitif janin yang dimulai dari trimester pertama dalam pembentukannya (Aryastami, 2017).

Prevalensi stunting di Provinsi Riau dari tahun 2013 sampai dengan 2019 dapat dilihat dari tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1
Prevalensi Balita Stunting Provinsi Riau Tahun 2013 – 2019

No	Tahun	Persentase Stunting
1	2013	36,6%
2	2016	25,1%
3	2017	29,7%
4	2018	27,4%
5	2019	24,1%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar (2020)

Dari Fokus (Lokus) Penanganan Stunting tahun 2019. Dengan dasar penetapan kabupaten lokus penanganan stunting sebagai berikut :

Tabel 1.2
Dasar Penetapan Kabupaten Kampar Sebagai Lokus Stunting Tahun 2019

No	Kriteria	Kabupaten Kampar
1	Jumlah Kecamatan / Desa	21 / 249
2	Jumlah penduduk tahun 2016	807.940 jiwa
3	Prevalensi stunting	31.99%
4	Jumlah balita stunting tahun 2016	28.789 jiwa
5	Tingkat kemiskinan	8,38%
6	Jumlah penduduk miskin	67.680 jiwa
7	10 Desa Lokus Stunting	Bangun Sari Tanjung Karang Danau Lancang Pulau Jambu Pandau Jaya Aur Kuning Terusan Gajah Bertalat Sungai Bungo Ranah Singkuang

Dari hasil survey dan data sigiziterpadu, prevalensi stunting di Kabupaten Kampar tahun 2013 sampai dengan 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Kampar Tahun 2013 – 2019

No	Tahun	Persentase Stunting
1	2013	32,1%
2	2016	28,7%
3	2017	27%
4	2018	32,1%
5	2019	23,07%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar (2020)

Dari hasil Riskesdas 2013 sampai dengan 2019 Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten Kampar memiliki prevalensi stunting sebesar 31.99%, dari standar WHO jika masalah stunting sudah di atas 20% harus segera di tangulangi, oleh karena itu Kampar termasuk salah satu Kabupaten atau Kota stunting yang tinggi. Yang menyebabkan tingginya stunting mulai dari pola asuh, masalah kebersihan lingkungan, air bersih, dan rumah yang tidak layak.

Tabel 1.4
Persentase balita stunting di desa lokus Kabupaten Kampar Tahun 2020

No	Desa	Jumlah Pendek dan Sangat Pendek	%	Keterangan
1	Tanjung Karang	17	33,3	Kec. Kampar Kiri Hulu
2	Ranah Singkuang	34	23,3	Kec. Kampar
3	Bangun Sari	16	20,8	Kec. Kampar Kiri Hilir
4	Balung Sungai	44	26,5	Kec. XIII Koto Kampar
5	Geringging	25	25,0	Kec. Kampar Kiri
6	Sungai Raja	20	20,4	Kec. Kampar Kiri
7	Padang Sawah	29	23,1	Kec. Kampar Kiri
8	Sungai Liti	51	23,9	Kec. Kampar Kiri
9	Batu Sanggan	8	20,5	Kec. Kampar Kiri Hulu
10	Indra Sakti	55	23,2	Kec. Tapung
11	Kampung Pinang	35	20,1	Kec. Perhentian Raja
12	Teluk Kenidai	46	24,8	Kec. Tambang
13	Bukit Betung	14	23,7	Kec. Kampar Kiri Hulu
14	Sialang Kubang	43	20,5	Kec. Perhentian Raja
15	Sungai Putih	22	20,1	Kec. Kampar Timur
16	tabing	38	21,3	Kec. Koto Kampar Hulu
	Total	497		

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar (2020)



Penetapan lokus intervensi tahun 2020 ini berdasarkan persentase balita stunting di atas 20%. Data ini diperoleh dari hasil analisis situasi dengan menggunakan data cakupan intervensi atau data prevalensi stunting di Kabupaten Kampar. Tabel 1.4 menunjukkan bahwa persentase balita stunting tertinggi ada di Desa Tanjung Karang. Desa ini secara geografis lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten. Begitu juga dengan Desa Balung yang berada di Kecamatan XIII Koto Kampar berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, Desa Tabing berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu, Desa Batu Sanggan dan Desa Bukit Betung berlokasi di perbatasan Sumatera Barat dan hanya dapat ditempuh melalui transportasi sungai, yaitu pompong. Jarak dan transportasi yang sulit menjadi kendala dalam menempuh perjalanan ke desa-desa lokus.

Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto menyebutkan, penyebab utama besarnya balita penderita stunting lantaran kekurangan gizi kronis mulai dari hamil sampai dua tahun terakhir atau 1.000 hari pertama kehidupan, selain itu kurangnya pemahaman orang tua terhadap pola asuh anak khususnya dalam hal pemberian asupan gizi.

Pengelola data Program Gizi Dinkes Kabupaten Kampar mengatakan ada beberapa faktor utama penyebab besarnya stunting di Kabupaten Kampar. Faktor tersebut adalah pola makan, pola asuh dan sanitasi. Namun, yang paling umum ditemukan adalah pola asuh. Padahal rata-rata perekonomian masyarakat Kampar sudah bagus dan layak, serta diklaim bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Kampar mengalami penurunan tahun 2018 lalu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena adanya situasi Covid-19 ada beberapa kendala kebijakan tentang penurunan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar sehingga kegiatan yang telah direncanakan tidak bisa terlaksanakan secara optimal. Karena tidak bisa mengumpulkan orang banyak, dan kendala lainnya ialah tentang anggaran karena pada kondisi saat ini banyak dana yang digunakan untuk penanggulangan Covid-19.

Dinas kesehatan Kabupaten Kampar merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan yang memiliki fungsi salah satunya adalah membuat kebijakan teknis dibidang kesehatan sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memberikan program-program dalam mengatasi permasalahan dibidang kesehatan dalam mengupayakan strategi hal yang mendukung penurunan stunting diantaranya adalah strategi organisasi, program yang akan dilaksanakan, serta sumber daya yang digunakan.

Dinas Kesehatan bekerjasama dengan OPD – OPD lainnya dalam penanggulangan penurunan stunting karena intervensi stunting itu ada dua, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. yang mana intervensi gizi spesifik itu pelaksanaannya adalah Dinas Kesehatan itu sendiri sedangkan intervensi gizi sensitif pelaksanaannya opd – opd lain seperti dinas PU dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya harus satu arah dan harus bekerjasama. Karena stunting ini dimulai dari lingkungan yang tidak bersih.

Dinas Kesehatan juga bekerja sama dengan kementerian desa untuk melakukan penanggulanagn penurunan stunting di Kabupaten Kampar. Karena dari dana desa digunakan untuk sosialisasi 1000 HPK (Hari Pertama Kelahiran) yang mana sumbernya dari dinas kesehatan tetapi dananya dari desa, Pemerintah



desa juga melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan stunting, Pemerintah desa memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas. Implementasi kegiatan dilakukan bekerja sama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas dan bidan desa, serta petugas Keluarga Berencana (KB), Pemerintah desa memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.

Upaya kesehatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, dalam hal ini Dinas Kesehatan tentunya dapat melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan bidang kesehatan.

Upaya pencegahan stunting ada 2 yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive. Upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen. Konvergensi penyampaian layanan membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program/kegiatan pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Dari latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk, melakukan penelitian guna memperoleh informasi yang akurat mengenai kasus stunting yang terjadi agar penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk semua orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



hususnya masyarakat Kampar dengan tujuan berkurangnya penderita stunting di Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, penelitian ini di angkat dengan judul **“Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Dinas Kesehatan KabupatenKampar”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada Latar Belakang, maka penulis dalam penelitian akan merumuskan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Impelementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Dinas Kesehatan KabupatenKampar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dalam penelitian ini membuat Tujuan Penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya, dan juga menambah wawasan keilmuan dibidang Pelayanan Publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi Objek Penelitian

Sebagai bahan masukan dan tambahan bagi pihak kantor untuk memperbaiki ke arah yang lebih baik lagi dan juga Memberikan Rekomendasi kepada Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Kampar.

3. Bagi Objek Pustaka

Hasil dari penelitian diharapkan dapat Menjadi Referensi Bagi peneliti berikutnya tentang kajian Analisis Kinerja Pegawai dan Pelayanan dan menjadi referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkan.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini adapun sistematika penulisannya adalah sebagaiberikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASANTEORI

Pada Bab II ini membuat landasan teori berupa poin-poin penting yang terdiri dari teori yang relevan dengan konsep atau variabel penelitian, dan terdiri dari beberapa referensi peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III ini penulis mengemukakan metode penelitian yang dilakukan dalam perancangan dan implementasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BABIV GAMBARAN UMUM OBJEKPENELITIAN

Pada Bab IV ini penulis memberikan bagaimana gambaran umum tentang Objek penelitian seperti ruang lingkup kegiatan dan menggambarkan mekanisme kerja atau uraian tugas pada objek penelitian.

BABV HASIL DAN PEMBAHASANPENELITIAN

Dalam Bab V ini penulis menerapkan dari hasil hasil tahapan penelitian mulai dari analisis, desain, dan implementasinya.

BABVI PENUTUP

Pada Bab VI ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Defenisi Kebijakan

Definisi kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Kebijakan merupakan rangkaian dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang organisasi atau pemerintah); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam suatu pencapaian tertentu (Gurning, 2018).

Ealau dan Pewitt 1973 dalam Ayuningtyas (2018) mengatakan bahwa kebijakan juga sebagai sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya. Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang menjadi keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memecahkan masalah demi kepentingan masyarakat.



2.2. Kebijakan Kesehatan

Barker 1996 dalam Ayuningtyas (2018) mengatakan bahwa Health Policy menurut WHO (2016) adalah sebagai keputusan, rencana dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kesehatan tertentu dalam masyarakat. Lahirnya kebijakan kesehatan dimaksudkan untuk mencapai misi dan masa depan sektor kesehatan memulai penetapan target dan titik acuan jangka pendek dan menengah. Kebijakan kesehatan sebagian sebagai kebijakan publik merupakan kumpulan dari keputusan-keputusan yang saling terkait yang membentuk suatu pendekatan atau strategi dalam pemberian pelayanan kesehatan. Karena begitu strategis dan pentingnya sektor kesehatan, World Health Organization (WHO) menetapkan delapan elemen yang harus tercakup dan menentukan kualitas dari sebuah kebijakan kesehatan, yaitu :

1. Pendekatan holistik, kesehatan sebaiknya didefinisikan sebagai sesuatu yang dinamis dan lengkap dari dimensi fisik, mental, sosial, dan spiritual. Artinya pendekatan dalam kebijakan kesehatan tidak dapat semata-mata mengandalkan upaya kuratif, tetapi harus lebih mempertimbangkan upaya preventif, promotif dan rehabilitatif.
2. Partisipatori, partisipasi masyarakat akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan, karena melalui partisipasi masyarakat dapat dibangun collective action (aksi bersama masyarakat) yang akan menjadi kekuatan pendorong dalam pengimplementasian kebijakan dan penyelesaian masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kebijakan publik yang sehat, yaitu setiap kebijakan harus diarahkan untuk mendukung terciptanya pembangunan kesehatan yang kondusif dan berorientasi kepada masyarakat.
4. Ekuitas, berarti harus terjadinya distribusi yang merata dari layanan kesehatan.
5. Efisiensi, berarti layanan kesehatan berorientasi proaktif dengan optimalisasi biaya dan teknologi.
6. Kualitas, berarti pemerintah harus menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
7. Pemberdayaan masyarakat, hal ini dapat mengoptimalkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.
8. Self-reliant, dapat memenuhi keyakinan dan kepercayaan masyarakat akan kapasitas kesehatan di wilayah sendiri (Ayuningtyas, 2014)

2.3. Sistem dan Komponen Kebijakan

Menurut Dunn (1994), sistem kebijakan memiliki hubungan timbal balik dari tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Hubungan timbal balik antara ketiga komponen sistem kebijakan tersebut digambarkan dalam Gambar berikut ini.



Gambar 2.1 Hubungan Komponen dalam Sistem Kebijakan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Dari Gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagai sebuah sistem, kebijakan merupakan sesuatu rangkaian dari beberapa komponen yang saling terkait dan bukan komponen yang berdiri sendiri. Segitiga sistem kebijakan menjelaskan adanya aktor kebijakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan publik. Kesemuanya juga tidak luput dari pengaruh lingkungan kebijakan, yaitu tatanan kelembagaan yang berperan dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang mengakomodasi aspek teknis, sosiopolitik maupun interaksi antara unsur kebijakan.

2.4. Implementasi Kebijakan

Purwanto 2012 dalam Ayuningtyas (2018) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah sebuah kegiatan yang mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para pelaksana kepada para kelompok sasaran (target group) untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan.

Meter dan Horn 1975 dalam Ayuningtyas (2018) mengatakan bahwa implementasi kebijakan juga merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu ataupun kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan.

Implementasi dipandang seolah sebagai proses transaksi yang berarti untuk melaksanakan program, pelaksana (implementor) harus menyelesaikan tugas-tugas yang dijanjikan mengurus masalah lingkungan, klien dan hal lain. Formalitas organisasi dan administrasi menjadi penting sebagai latar belakang dalam melakukan implementasi, namun sebagai kunci kesuksesannya adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyelesaikan konteks, personalitas, aliansi dan kegiatan-kegiatan secara berkelanjutan (Ayuningtyas, 2018).

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Model implementasi kebijakan Edwards III,. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut berhubungan satu sama lain. Menurut Edward George III dalam bukunya Solichin Abdul Wahab faktor atau indikator tersebut adalah:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

a) Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi kebijakan yang baik pula. Sering kali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi. Oleh karena itu seorang implementor harus mampu memahami makna dari suatu kebijakan, agar pada saat menyampaikan isi kebijakan kepada pihak lain dapat dipahami sebagaimana makna sebenarnya dan kebijakan dapat terimplementasi dengan baik.

b) Kejelasan

Kejelasan disini maksudnya adalah bagaimana komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membbingungkan atau tidak ambigu. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.

c) Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah-perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial, sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

a) Staf

Barangkali sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf. Ada satu hal yang harus diingat adalah bahwa jumlah tidak selalu mempunyai positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi yang berhasil. Namun disisi lain, kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelit menyangkut implmentasi yang efektif.

b) Informasi

Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan.

c) Wewenang dan fasilitas

Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah wewenang dan fasilitas atau sarana dan prasarana. Ketika wewenang tidak ada digunakan maka kekuatan implementor dimata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik.

Fasilitas fisik atau non fisik adalah dalam bentuk sarana dan prasarana bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana ataau staf menginginkan fasilitas yang memadai. Dengan hal itu, staf memahami apa yang harus dilakukan, dan wewenang yang dimiliki dapat digunakan untuk melakukan koordinasi melakukan perlengkapan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan akan berhasil.

3. Disposisi/ Sikap Pelaksana

Disposisi adalah karakteristik atau watak yang dimiliki implementor, seperti komitmen, kejujuran, ketaatan pada aturan, sifat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



demokratis, apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

a) Pengangkatan Birokrat

Kecendrungan-kecendrungan pelaksanaan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan. Hanya yang menjadi persoalan adalah bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi, dan mereka harus digantikan oleh personil yang berdedikasi tinggi.

b) Intensif

Mengubah personil atau pelaksana pemerintah merupakan pekerjaan yang sangat sulit dan tidak menjamin proses implementasi kebijakan berjalan lancar. Untuk mengatasi masalah tersebut adalah memberikan intensif atau uang tambah, hal ini mampu menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik.

4. Struktur Organisasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan kebijakan. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks harus dijalankan secara kondusif agar pelaksana kebijakan dapat berjalan efektif.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan. Yang menjadi karakteristik disini adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) *Standart Operating Prosedur*

Standart Operating Prosedur merupakan tuntutan internal akan kepaastian waktu dari sumber daya dalam organisasi. Ini adalah dilihat dari struktural yang paling dasar dari organisasi adalah prosedur-prosedur kerja. Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dengan baik dan implementasi dapat berjalan dengan baik.

b) Fragmentasi atau tanggungjawab

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi. Tanggung jawab bagi suatu kebijakan sering dijadikan sebagai usaha-usaha yang memungkinkan mereka mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan dengan telah direncanakan demi keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan.

2.5. Strategi Dinas Kesehatan

Saat ini strategi tidak hanya digunakan pada sektor privat atau swasta tetapi juga telah ditetapkan pada sektor publik atau pemerintah. Penerapan manajemen strategi pada kedua jenis institusi tersebut tidaklah jauh berbeda. Jika di sektor swasta bertujuan mencari laba, maka pada sektor pemerintah manajemen strategi lebih pada memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai Lokasi Fokus Kabupaten/Kota Prioritas Tahap 2 dalam Penanggulangan Stunting mulai tahun 2019. Penetapan berdasarkan hasil keputusan rapat kegiatan padat karya dan penanganan stunting



yang diselenggarakan oleh TNP2K, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Bappenas, tanggal 15 Desember 2018. Dari hasil keputusan rapat ditetapkan 160 Kabupaten/Kota Prioritas Tahap 1 dan Tahap 2 dengan masing-masing 10 desa untuk penanganan stunting. Bupati Kampar menandatangani Komitmen Penurunan Stunting bersama Presiden Republik Indonesia di bulan Juli tahun 2019.

Menurut panduan konvergensi program/kegiatan percepatan pencegahan stunting dari TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Stunting) Sekretariat Wakil Presiden, Konvergensi percepatan pencegahan stunting adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama menasar kelompok sasaran prioritas yang tinggal di desa untuk mencegah stunting. Penyelenggaraan intervensi, baik gizi spesifik maupun gizi sensitif, secara konvergen dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan stunting. Dalam pelaksanaannya, upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting dilakukan mulai pada tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Pencegahan stunting dilakukan melalui intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menyasar kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan pencegahan stunting.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Satelistic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Intervensi gizi spesifik (Tabel 1.1.) menasar penyebab stunting yang meliputi (i) kecukupan asupan makanan dan gizi, (ii) pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan (iii) pengobatan infeksi/penyakit. Terdapat tiga kelompok intervensi gizi spesifik, yaitu: 1. Intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi sebagai paling berdampak pada pencegahan stunting dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas. 2. Intervensi pendukung, yaitu intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait stunting dan dilakukan setelah intervensi prioritas terpenuhi. 3. Intervensi prioritas sesuai kondisi, yaitu intervensi yang dilakukan sesuai dengan kondisi tertentu, termasuk untuk kondisi darurat bencana (program gizi darurat).

Tabel 2.1.
Intervensi Gizi Spesifik Percepatan Pencegahan Stunting

Kelompok Sasaran	Intervensi Prioritas	Intervensi Pendukung	Intervensi Prioritas Sesuai Kondisi
Intervensi Gizi Spesifik – Sasaran Prioritas			
Ibu hamil	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin • Suplementasi tablet tambah darah 	<ul style="list-style-type: none"> • Suplementasi kalsium • Pemeriksaan kehamilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan dari malaria • Pencegahan HIV
Ibu menyusui dan anak 0-23 bulan	<ul style="list-style-type: none"> • Promosidan konseling menyusui • Promosi dan konseling pemberian makan bayidan anak (PMBA) • Tata laksana gizi buruk akut • Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut • Pemantauan dan promosi pertumbuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Suplementasi kapsul vitamin A • Suplementasi taburia • Imunisasi • Suplementasi zinc untuk pengobatan diare • Manajemen terpadu balita sakit (MTBS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan kecacingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Intervensi gizi sensitif (Tabel 1.2.) mencakup: (i) peningkatan akses pangan bergizi; (ii) peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; (iii) peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan (iv) peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi. Intervensi gizi sensitif umumnya dilaksanakan di luar Kementerian Kesehatan. Sasaran intervensi gizi sensitif adalah keluarga dan masyarakat umum. Program/ kegiatan intervensi gizi sensitif dapat ditambah dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Tabel 2.2.
Intervensi Gizi Sensitif Percepatan Pencegahan *Stunting*

Kelompok Intervensi	Jenis Intervensi
Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Akses air minum yang aman • Akses sanitasi yang layak
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Akses pelayanan Keluarga Berencana (KB) • Akses Jaminan Kesehatan (JKN) • Akses bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu (PKH)
Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebarluasan informasi melalui berbagai media • Penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi • Penyediaan konseling pengasuhan untuk orangtua • Penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh-kembang anak • Penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja • Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Peningkatan akses pangan bergizi	<ul style="list-style-type: none"> • Akses Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu • Akses fortifikasi bahan pangan utama (garam, tepung terigu, minyak goreng) • Akses kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) • Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan



Upaya percepatan pencegahan *stunting* akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen. Konvergensi penyampaian layanan membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program/kegiatan pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Dengan kata lain, konvergensi didefinisikan sebagai sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *stunting*. Penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

Upaya konvergensi percepatan pencegahan *stunting* dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi program/kegiatan. Pada tahap perencanaan, konvergensi diarahkan pada upaya penajaman proses perencanaan dan penganggaran regular yang berbasis data dan informasi faktual agar program dan kegiatan yang disusun lebih tepat sasaran melalui: (i) pelaksanaan analisis situasi awal; (ii) pelaksanaan retribusi *stunting*; dan (iii) penyusunan rencana kerja. Analisis situasi awal dan retribusi *stunting* dilakukan untuk mengetahui kondisi *stunting* di wilayah kabupaten/kota, penyebab utama, dan identifikasi program/kegiatan yang selama ini sudah dilakukan. Dari analisis ini diharapkan dapat menentukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program/kegiatan, kelompok sasaran, sumber pendanaan² dan lokasi upaya percepatan pencegahan *stunting* di daerah, yang kemudian diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada tahap pelaksanaan, konvergensi diarahkan pada upaya untuk melaksanakan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara bersama dan terpadu di lokasi yang telah disepakati bersama, termasuk didalamnya mendorong penggunaan dana desa untuk percepatan pencegahan *stunting* dan mobilisasi Kader Pembangunan Manusia (KPM).

Sedangkan pada tahap pemantauan dan evaluasi, konvergensi dilakukan melalui pelaksanaan pemantauan yang dilakukan bersama dengan menggunakan mekanisme dan indikator yang terkoordinasikan dengan baik secara berkelanjutan. Sehingga hasil pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang terkait untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan upaya percepatan pencegahan *stunting* dan memberikan masukan bagi tahap perencanaan dan penganggaran selanjutnya.

Pemerintah daerah Kabupaten Kampar melakukan Kegiatan penurunan *stunting* terdiri dari delapan aksi, yaitu :

1. Aksi 1 : Analisis Situasi
2. Aksi 2 : Rencana Kegiatan dan Anggaran
3. Aksi 3 : Rembuk Stunting
4. Aksi 4 : Peraturan Bupati / Surat Edaran / Perwali



5. Aksi 5 : Pembinaan KPM
6. Aksi 6 : Sistem Manajemen Data
7. Aksi 7 : Pengukuran dan Publikasi Data Stunting
8. Aksi 8 : Review Kinerja Tahunan

Kegiatan penurunan stunting di Kabupaten Kampar dimulai dengan aksi 1, yaitu analisis situasi dengan menggunakan tools Master Analisis Situasi. Dari analisis situasi ditemukan 16 desa lokus stunting Tahun 2020 dan telah diterbitkan SK oleh Bupati Kampar. Untuk desa Lokus 2019 sudah mengikuti ketetapan dari Bappenas, yaitu 10 Desa Lokus stunting.

Dilanjutkan dengan aksi 2 yaitu merencanakan kegiatan yang dimulai dari matriks rencana kegiatan Kabupaten Kampar, matriks rencana kegiatan dilokasi fokus, matriks pemantauan integrasi rencana kegiatan pada tahun berjalan, dan matriks pemantauan integrasi rencana kegiatan untuk tahun rencana 2021. Ada 15 OPD terkait stunting. Masing-masing OPD telah membuat perencanaan dan penganggaran untuk mencegah dan intervensi stunting. Kegiatan dilaksanakan dari intervensi spesifik Dinas Kesehatan yang berpengaruh 30% terhadap penurunan stunting dan intervensi sensitif yang berpengaruh 70% terhadap penurunan stunting.

Setelah itu dilanjutkan Rembuk Stunting, format acara langsung dengan DPRD, 15 OPD terkait, dan zoom meeting untuk OPD lainnya, Forkopimda, Camat, Kepala Puskesmas, Lembaga Pendidikan, Organisasi Profesi, dan Kepala Desa se-Kabupaten Kampar. Saat rembuk menyepakati hasil analisa situasi dan rekomendasinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di aksi 4 diterbitkan peraturan bupati tentang penurunan stunting, tim percepatan penurunan stunting, peran desa dalam penurunan stunting terintegrasi, dan surat edaran tentang pembinaan dan pengendalian dana desa tahun anggaran 2020 untuk pelaksanaan padat karya tunai desa dan pencegahan penyebaran COVID-19. Bupati Kampar langsung berpartisipasi dalam sosialisasi Perbub 32 tahun 2020 tentang peran desa dalam penurunan stunting terintegrasi.

Di Aksi 5 pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dengan menerbitkan SK dari desa dan kelurahan tentang penunjukan KPM dan mendata desa yang telah mengganggu operasional KPM. Di Kabupaten Kampar sudah lebih dari 90 persen desa kelurahan yang mengganggu operasional KPM.

Di sistem manajemen data di aksi 6, matriks data prevalensi dan jumlah stunting perdesa, matriks data cakupan intervensi tingkat kabupaten, matriks data cakupan intervensi perdesa, status realisasi kegiatan perbaikan system manajemen data OPD, dan hasil pemetaan kondisi data sebaran stunting dan cakupan intervensi. Di Aksi 6 juga memperhatikan cakupan di desa lokus tahun 2019 dan 2020 serta mengevaluasi lokus stunting 2019 di tahun 2020.

Di aksi 7 pengukuran dan publikasi stunting, menganalisa hasil pengukuran data stunting tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan, publikasi hasil pengukuran tingkat kecamatan dan publikasi pengukuran tingkat kabupaten. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan aplikasi sigizi terpadu / EPPGBM (Elektronik Pelaporan dan Pencatatan Gizi Berbasis Masyarakat). Publikasi oleh diskominfo di media cetak dan media elektronik serta videotron yang ada di Kabupaten Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Di aksi 8, mereviu kinerja tahunan dengan memperhatikan matriks rencana dan realisasi, matriks permasalahan dan kendala dan pemutakhiran status. Dari hasil reviu direncanakan penambahan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan stunting serta Talk Show di media elektronik pada bulan Maret 2020. Tujuan talk show ini untuk menyebarluaskan informasi kepada seluruh masyarakat tentang penurunan dan pencegahan stunting.

Untuk menyelenggarakan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif secara konvergen agar tepat melayani kelompok sasaran dan tepat lokasi desa, pemerintah kabupaten/kota mempunyai peran yang strategis, sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan pencegahan stunting, termasuk peningkatan peran camat dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian percepatan pencegahan stunting di wilayahnya.
- b. Mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan pencegahan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada kecamatan dan desa.
- c. Menganangkan komitmen bersama antara pemerintahan daerah, desa, dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan pencegahan stunting secara konsisten dan berkelanjutan.
- d. Dan lain sebagainya.

2.6. Implementasi Kebijakan dan Program Stunting

Program Implementasi kebijakan penurunan stunting pada Dinas Kesehatan membuat kegiatan seperti:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Posyandu mobile : yang mana mobil ambulan pergi ketempat tempat keramaian Sehingga pemantauan pertumbuhan balita bisa terlaksana secara optimal.
2. Gadi Ancak (dalam bahasa ocu gadi ancak berarti perempuan cantik) : Adalah pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri, yang di laksanakan oleh puskesmas bekerja sama dengan PKK desa dan kader remaja. Pencatatan minum tablet tambah darah di kartu suplementasi gizi untuk remaja dan wanita usia subur
3. Ocu Mapan (optimalisasi cara untuk mandiri pangan) : Dengan sasaran rumah tangga yang memanfaatkan lahan pekarangan untuk mewujudkan rumah tangga yang mandiri pangan dan mencegah balita stunting dengan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman dari lahan pekarangan.
4. Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Gemar Makan Ikan) : Kegiatan ini sejalan dengan kondisi geografis Kabupaten Kampar yang memiliki banyak potensi hasil ikan dari Sungai Kampar dan juga perikanan darat (kolam).
5. Sosialisasi kepada masyarakat tentang gizi ikan, kepada balita yang ada di PAUD dengan lomba mewarnai ikan, lomba memasak siswi SMA sederajat untuk mempersiapkan calon ibu yang memahami cara memasak ikan dengan aneka macam kreasi sehingga menarik untuk dikonsumsi oleh keluarga dan Lomba memasak ikan antar PKK 21 Kecamatan untuk menyebarluaskan informasi manfaat mengkonsumsi ikan dari PKK kepada



masyarakat, sebagai salah satu sumber pangan hewani dalam mencegah stunting.

6. Bimtek Pendidikan Keluarga : Agar orang tua dapat mengembangkan potensi balita dan meningkatkan cara asuh yang tepat sehingga pertumbuhan balita 1000 HPK lebih optimal dan bebas stunting

Terkait upaya untuk mengurangi serta menangani prevalensi stunting, pemerintah di tingkat nasional kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan serta regulasi yang diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan prevalensi stunting, termasuk diantaranya:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 (Pemerintah melalui program pembangunan nasional ‘Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019’, menetapkan bahwa pada tahun 2019, Indonesia dapat menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi 100% rakyat Indonesia).
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 (target penurunan prevalensi stunting menjadi 28% pada 2019).
3. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015, Bappenas, 2011.
4. Undang-Undang (UU) No. 36/2009 tentang Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah (PP) No.33/2012 tentang Air Susu Ibu Eksklusif
6. Peraturan Presiden (Perpres) No. 42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No. 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Ais Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia
8. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.15/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.
9. Permenkes No.3/2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
10. Kerangka Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Gizi Dalam Rangka Seribu Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1.000 HPK), 2013.
11. Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK), 2013.

Beberapa hal yang kemungkinan menjadi penyebab belum efektifnya kebijakan serta program Intervensi Stunting yang ada dan telah dilakukan adalah:

- a. Kebijakan dan regulasi terkait Intervensi Stunting belum secara maksimal dijadikan landasan bersama untuk menangani stunting,
- b. Kementerian/Lembaga (K/L) melaksanakan program masing-masing tanpa koordinasi yang cukup.
- c. Program-program Intervensi Stunting yang telah direncanakan belum seluruhnya dilaksanakan.
- d. Program/intervensi yang ada (baik yang bersifat spesifik gizi maupun sensitif gizi) masih perlu ditingkatkan rancangannya, cakupannya, kualitasnya dan sasarannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- e. Program yang secara efektif mendorong peningkatan pengetahuan gizi yang baik dan perubahan perilaku hidup sehat masyarakat belum banyak dilakukan.
- f. Program-program berbasis komunitas yang efektif di masa lalu tidak lagi dijalankan secara maksimal seperti sebelumnya misalnya akses ke Posyandu, PLKB, kader PKK, Dasawisma, dan lainnya, serta;
- g. Pengetahuan dan kapasitas pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menangani stunting perlu ditingkatkan.

2.7. Pengertian Stunting

Stunting merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu pengerdilan dimana keadaan tubuh yang pendek dan sangat pendek hingga melebihi keadaan seharusnya dibawah median panjang atau tinggi badan. *Stunting* dapat di diagnosis melalui indeks antropometri tinggi badan yang mencerminkan pertumbuhan linear yang di capai pada pra dan pasca persalinan dengan indikasi kekurangan gizi jangka panjang, akibat dari gizi yang tidak memadai. *Stunting* merupakan pertumbuhan linear yang gagal untuk mencapai potensi genetik sebagai akibat dari pola makan yang buruk dan penyakit infeksi (ACC/SCN, 2000).

Stunting ialah masalah gizi utama yang akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Ada bukti jelas bahwa individu yang *stunting* memiliki tingkat kematian lebih tinggi dari berbagai penyebab dan terjadinya peningkatan penyakit. *Stunting* akan mempengaruhi kinerja pekerjaan fisik dan fungsi mental dan intelektual akan terganggu (Mann dan Truswell, 2002). Hal tersebut juga didukung oleh Jackson dan calder (2004) menyatakan



stunting berhubungan dengan gangguan fungsi kekebalan dan meningkatkan resiko kematian.

Anak bertubuh pendek juga bisa disebabkan karena faktor *Short Stature*, dimana panjang atau tinggi badan menurut umur dan jenis kelamin berada dibawah rata-rata teman seusianya. Sedangkan anak yang bertubuh pendek karena *Stunting* mengalami gagal tumbuh akibat kondisi kesehatan dan nutrisi yang tidak optimal. Anak yang pendek normal ada yang patologis, yang patologis ini dilihat lagi, apakah patologis profesional atau tidak. Kalau tidak profesional biasanya katena kelainan Genetik contohnya Cebol. Jika profesional itu salah satunya adalah *stunting*.

2.8. Ciri-ciri Stunting pada Anak

Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami *stunting*. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO.

Menurut Kemenkes RI, balita bisa diketahui *stunting* bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal.

Seorang anak termasuk dalam *stunting* atau tidak, tergantung dari hasil pengukuran tersebut. Jadi tidak bisa hanya dikira-kira atau ditebak saja tanpa pengukuran.

Selain tubuh yang berperawakan pendek dari anak seusianya, ada juga ciri-ciri lainnya yakni:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pertumbuhan melambat
- Wajah tampak lebih muda dari anak seusianya
- Pertumbuhan gigi terlambat
- Performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya
- Usia 8 – 10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya
- Berat badan balita tidak naik bahkan cenderung menurun.
- Perkembangan tubuh anak terhambat, seperti telat menarche (menstruasi pertama anak perempuan).
- Anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi.

Sementara untuk tahu apakah tinggi anak normal atau tidak, Anda harus secara rutin memeriksakannya ke pelayanan kesehatan terdekat. Anda bisa membawa si kecil ke dokter, bidan, posyandu, atau puskesmas setiap bulannya.

2.9. Dampak Masalah Stunting Pada Anak

Stunting adalah gagal tumbuh akibat akumulasi ketidakcukupan zat gizi yang berlangsung lama dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Maka itu, kondisi ini bisa memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak secara keseluruhan. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisiknya, serta gangguan metabolisme.

Dampak jangka panjangnya, stunting yang tidak ditangani dengan baik sedini mungkin berdampak:

- Menurunkan kemampuan perkembangan kognitif otak anak
- Kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Risiko tinggi munculnya penyakit metabolik seperti kegemukan
- Penyakit jantung
- Penyakit pembuluh darah
- Kesulitan belajar

Bahkan, ketika sudah dewasa nanti, anak dengan tubuh pendek akan memiliki tingkat produktivitas yang rendah dan sulit bersaing di dalam dunia kerja. Bagi anak perempuan yang mengalami stunting, ia berisiko untuk mengalami masalah kesehatan dan perkembangan pada keturunannya saat sudah dewasa. Hal tersebut biasanya terjadi pada wanita dewasa dengan tinggi badan kurang dari 145 cm karena mengalami stunting sejak kecil.

Ibu hamil yang bertubuh pendek di bawah rata-rata (*maternal stunting*) akan mengalami perlambatan aliran darah ke janin serta pertumbuhan rahim dan plasenta. Bukan tidak mungkin, kondisi tersebut berdampak pada kondisi bayi yang dilahirkan. Bayi yang lahir dari ibu dengan tinggi badan di bawah rata-rata berisiko mengalami komplikasi medis yang serius, bahkan pertumbuhan yang terhambat.

Perkembangan saraf dan kemampuan intelektual bayi tersebut bisa terhambat disertai dengan tinggi badan anak tidak sesuai usia. Selayaknya stunting yang berlangsung sejak kecil, bayi dengan kondisi tersebut juga akan terus mengalami hal yang sama sampai ia beranjak dewasa.

2.10. Cara Mencegah Stunting

Kejadian anak dengan tinggi badan pendek bukan masalah baru di dunia kesehatan dunia. Di Indonesia sendiri, stunting adalah masalah gizi pada anak



yang masih menjadi pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan dengan baik. Terbukti menurut data Pemantauan Status Gizi (PSG) dari Kementerian Kesehatan RI, jumlah anak pendek terbilang cukup tinggi. Kasus anak dengan kondisi ini memiliki jumlah tertinggi jika dibandingkan dengan permasalahan gizi lainnya, seperti anak kurang gizi, kurus, dan gemuk.

Pertanyaan selanjutnya adalah, bisakah stunting pada anak dicegah sejak dini? Jawabannya, bisa. Stunting pada anak merupakan satu dari beberapa program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah agar angka kasusnya diturunkan setiap tahun. Ada berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016. Cara mencegah stunting menurut Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, yakni:

Cara mencegah stunting untuk ibu hamil dan bersalin

Beberapa cara mencegah stunting untuk ibu hamil dan bersalin yaitu:

- Pemantauan kesehatan secara optimal beserta penanganannya, pada 1.000 hari pertama kehidupan bayi.
- Pemeriksaan kehamilan atau *ante natal care* (ANC) secara rutin dan berkala.
- Melakukan proses persalinan di fasilitas kesehatan terdekat, seperti dokter, bidan, maupun puskesmas.
- Memberikan makanan tinggi kalori, protein, serta mikronutrien untuk bayi (TKPM).
- Melakukan deteksi penyakit menular dan tidak menular sejak dini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Memberantas kemungkinan anak terserang cacingan.
- Melakukan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan penuh.

Anda bisa berdiskusi dengan dokter kandungan untuk melakukan pencegahan stunting yang sudah disarankan di atas.

Cara mencegah stunting untuk anak balita

Sementara itu cara mencegah stunting pada balita, yaitu:

- Rutin memantau pertumbuhan perkembangan balita.
- Memberikan makanan tambahan (PMT) untuk balita.
- Melakukan stimulasi dini perkembangan anak.
- Memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal untuk anak.

Anda bisa berdiskusi dengan dokter anak untuk menyesuaikan dengan kebiasaan si kecil, agar pencegahan stunting bisa dilakukan.

Cara mencegah stunting untuk anak usia sekolah

Anak sekolah juga perlu diberi pembekalan sebagai upaya pencegahan stunting, seperti:

- Memberikan asupan gizi sesuai kebutuhan harian anak.
- Mengajarkan anak pengetahuan terkait gizi dan kesehatan.

Lakukan secara perlahan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak.

Untuk remaja

Meski stunting pada remaja tidak bisa diobati, tapi masih bisa dilakukan perawatan, di antaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

14-17 tahun.

Untuk dewasa muda

Berikut cara mencegah kondisi ini pada usia dewasa muda:

- Memahami seputar keluarga berencana (KB)
- Melakukan deteksi dini terkait penyakit menular dan tidak menular
- Senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS), pola gizi seimbang, tidak merokok, dan tidak memakai narkoba.

Intinya, jika ingin mencegah stunting, asupan serta status gizi seorang calon ibu harus baik. Hal ini kemudian diiringi dengan memberikan asupan makanan yang berkualitas ketika anak telah lahir.

2.11. Pandangan Islam Terhadap Stunting

Pencegahan Stunting Dalam Perspektif Hukum Islam, yang merujuk pada Alquran Surat An- Nisaa ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar". (QS. An- Nisaa :9)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan Allah berfirman pada Quran Surah Al-Baqarah Ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (men-derita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apa-bila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah : 233)

Stunting (Al-taqazzum) adalah kondisi perkembangan fisik yang timpang pada balita yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan sampai usia anak dua tahun. Dan stunting dapat menghambat pertumbuhan anak baik motorik (gerakan) maupun kognitif (pengetahuan). Ketiga, pencegahan stunting adalah disunahkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Keempat, perbuatan yang berpotensi menimbulkan stunting adalah makruh.

2.12. Penelitian Terdahulu

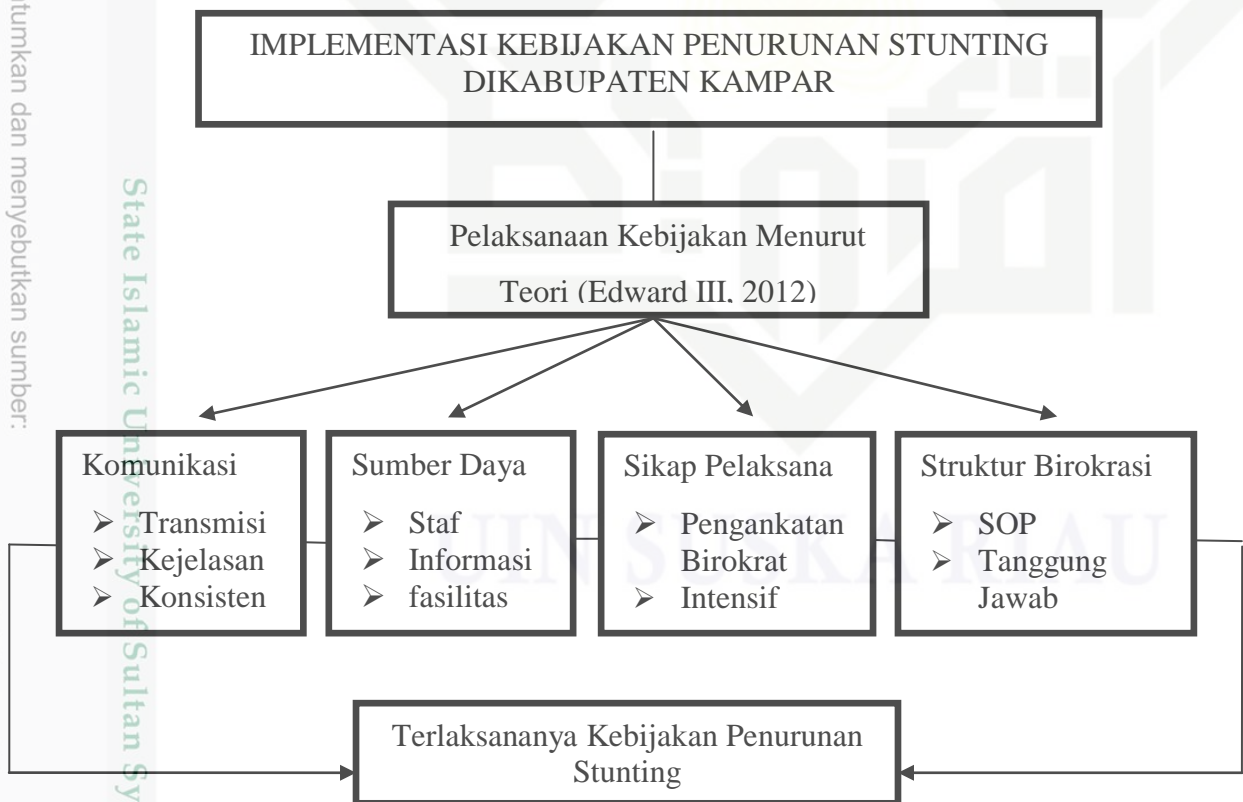
Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan yang akan diteliti tentang Strategi Dinas

Kesehatan Kabupaten Kampar Dalam Menekan Laju Penderita Stunting di Kabupaten Kampar.

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	JUDUL	PENULIS	HASIL
1	ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI DESA SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT	Sri Hajjah Purba, Universitas Islam Negri Sumatera Utara Medan	Berdasarkan hasil penelitian analisis implementasi kebijakan penurunan stunting di Desa Secanggamaka dapat di simpulkan : Implementasi kebijakan penurunan stunting sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan daerah Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting, tetapi masih belum maksimal dalam mensosialisasikan ke masyarakat sehingga masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengerti bagaimana cara penurunan stunting.

2.13. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.14. Konsep Operasional

Tabel 2.4
Operasional Indikator Penelitian

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Pelaksanaan Kebijakan Penurunan Stunting Menurut Edrward III 2012	1. Komunikasi	<p>a. Transmisi kebijakan dilaksanakan melalui sosialisasi kepada seluruh pegawai dan masyarakat mengenai kebijakan</p> <p>b. Koordinasi dalam pemberian informasi berjalan baik dan harus mengandung kejelasan agar maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut dapat dipahami dan di realisasikan dengan baik.</p> <p>c. Teknik pengsosialisasian yang telah tersampaikan kepada pelaksana kebijakan akan menghasilkan konsistensi dalam pelaksanaannya.</p>
	2. Resouces (sumber daya)	<p>a. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh staf yangcukup serta pegawai dengan kualitas dan kuantitas yang maksimal.</p> <p>b. Seluruh staf atau pegawai Memaksimalkan pemberian informasi kebijakan sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan.</p> <p>c. Memanfaatkan wewenang yang dimiliki dengan menyediakan sarana dan prasarana dengan anggaran yang cukup dan memadai.</p>
	3. Diposisi (sikap atau Komitmen)	<p>a. Pengangkatan birokrat atau pelaksana dilakukan untuk menghasilkan pegawai memiliki pemahaman yang kuat.</p> <p>b. Agar sikap pelaksana berjalan dengan baik maka diberi intensif sebagai motivasi kerja sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Memiliki respon yang baik terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah.</p>
	4. Struktur birokrasi	<p>a. Adanya Standar Operating Procedures (SOP) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan kebijakan.</p> <p>b. Pejabat yang berkepentingan terhadap aturan tersebut memberikan perannya dengan tanggungjawab demi tercapainya tujuan kebijkan.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis Penelitian ini yaitu metode kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan masalah atau keadaan bahkan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat mengungkapkan fakta yang diperoleh di lapangan dan memberikan gambaran secara objektif mengenai apa yang terjadi sebenarnya dari objek yang akan diteliti.

Tipe Penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Yaitu penelitian yang sifatnya mendalam mengenai individu/perorangan, organisasi, program kegiatan, atau bahkan lain sebagainya dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, tujuannya yaitu untuk mendapatkan deskripsi atau gambaran yang secara utuh dan mendalam dari suatu entitas. sehingga menghasilkan data yang selanjutnya dapat di analisis untuk menghasilkan teori.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan Penelitian ini, Penulis Melakukan Penelitian dengan mengambil lokasi di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar jalan Dr. A Rahman Saleh No. 22.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan catatan dari kumpulan fakta. Dalam keilmuan, fakta dikumpulkan untuk kemudian menjadi data. Kemudian data di olah sehingga dapat dipaparkan secara jelas dan dengan tepat sehingga dapat dipahami oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain yang secara tidak langsung mengalami. Sumber data dari penelitian ini terdiri atas data primer serta data sekunder

1. Data Primier

Data primer yaitu data yang secara langsung diperoleh dari sumber yang asli atau yang pertama. Data ini diperoleh melalui narasumber atau informan atau dalam istilah lain responden, yaitu merupakan orang yang dijadikan dan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data di lokasi tempat meneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sifatnya mendukung dari keperluan dari data primer seperti halnya dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Obvervasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna mendapatkan keterangan mengenai data yang lebih akurat tentang hal-hal yang diteliti. Masalah yang diamati dalam penelitian terhadap Strategi Dinas kesehatan dalam menekan laju penderita stunting kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara ialah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu seputar hal yang diteliti pada seseorang yang menjadi informan atau responden. Cara yang dilakukan adalah bisa dengan bercakap-cakap secara bertatap muka. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau dengan Tanya jawab secara langsung. Menurut Patton, pada proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara, interview dilengkapi dengan pedoman wawancara yang umum, mencantumkan isu-isu masalah yang harus di liput dengan tidak menentukan urutan pertanyaan, atau bahkan mungkin tidak berbentuk pertanyaan yang eksplisit.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik untuk memperoleh data melalui buku-buku dan sejenisnya yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Akan tetapi dokumentasi bisa juga didapatkan dengan mengambil foto-foto dan sebagainya.

3.5. Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber atau tempat untuk memperoleh keterangan penelitian. Menurut Sugiyono (2013:221), penentuan sampel informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Dengan adanya responden atau subjek penelitian akan lebih mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu, subjek sangat

berpengaruh besar terhadap sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3.1
Daftar Informan

No	Narasumber	Jumlah
1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar	1 orang
2	Seretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar	1 orang
3	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	1 orang
4	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan	1 orang
5	Masyarakat	6 orang
Jumlah		10 orang

Sumber : Data Olahan Tahun 2021

3.6. Teknik Analisa Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu dilakukan pada saat pengumpulan data sedang berlangsung , dan sudah selesai pengumpulan data pada kurun waktu tertentu. Tentunya Pada saat wawancara berlangsung, peneliti telah melakukan analisa terhadap apa yang menjadi jawaban dari pihak yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisa, namun masih terasa belum memuaskan bagi peneliti, maka peneliti dapat melanjutkan pertanyaan selanjutnya, sampai tahap tertentu atau dirasa sudah memuaskan, barulah diperoleh data yang dianggap kredibel.

Langkah-langkah analisis data setelah dilakukannya pengumpulan yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data juga memiliki arti yaitu merangkum, memulih hal pokok yang dianggap penting dan dibutuhkan sehingga data yang sudah reduksi dapat memberikan gambaran yang jelas, serta mempermudah bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya



2. Penyajian data

Setelah mereduksi data, selanjutnya langkah yang dilakukan adalah penyajian data, langkah selanjutnya yaitu dimana penyajian data merupakan penyusunan informasi sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Apabila kesimpulan yang diperoleh peneliti pada tahap awal masih bersifat sementara, dan masih akan berubah apabila tidak lagi ditemukan bukti kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetap jika kesimpulan yang dikemukakan peneliti pada tahap awal, didukung didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel atau dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penarikan kesimpulan data yang telah di analisis dapat digunakan dalam penarikan kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Keadaan Geografis Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar dengan ibukota Bangkinang merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Riau setelah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir. Secara geografis Kabupaten Kampar berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru di sebelah utara, Kabupaten Kuantan Singingi di sebelah selatan, Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatra Barat di sebelah barat dan Kabupaten Pelalawan dan Siak disebelah timur. Luas wilayah Kabupaten Kampar mencapai 10.983,47 Km². Letak astronomisnya antara 1⁰⁰' lintang selatan dan 100⁰28'-101⁰14' bujur timur. Suhu rata-rata di Kabupaten Kampar tahun 2019 berkisaran antara 27,7⁰C hingga 29,4⁰C.

4.2 Pemerintah

Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam Provinsi Sumatra Tengah. Dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undangundang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Kemudian untuk perkembangan kota pekanbaru, Pemerintah daerah Kabupaten Kaampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar dulunya merupakan gabungan dari Kabupaten Rokan Hulu, Pelalawan dan Kampar. Pada awal pembentukannya Kabupaten Kampar terdiri dari 8 Kecamatan, kemudian dimekarkan hingga kini menjadi 21 kecamatan. Saat ini Kabupaten Kampar terdiri dari 242 Desa dan 8 Kelurahan. Untuk mengetahui kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Daftar Kecamatan di Kabupaten Kampar

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk
1	Bangkinang Kota	177,18	194,02
2	Kampar	136,28	334,42
3	Tambang	371,94	170,37
4	XII Koto Kampar	732,40	30,23
5	Kuok	151,41	151,41
6	Siak Hulu	689,80	111,12
7	Kampar Kiri	915,33	30,12
8	Kampar Kiri Hilir	759,74	14,46
9	Kampar Kiri Hulu	1.301,25	7,80
10	Tapung	1.365,97	61,52
11	Tapung Hilir	1.013,56	52,44
12	Tapung Hulu	1.167,15	71,13
13	Salo	207,83	116,22
14	Rumbio Jaya	76,92	221,41
15	Bangkinang	253,50	131,16
16	Perhentian Raja	111,54	176,68
17	Kampar Timur	173,08	138,43
18	Kampar Utara	79,84	227,71
19	Kampar Kiri Tengah	330,59	85,68
20	Gunung Sahilan	597,97	37,29
21	Koto Kampar Hulu	674	30,43

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar tahun 2021)

4.3 Sejarah Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Kampar,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dinyatakan bahwa kedudukan Dinas Kesehatan adalah sebagai penyelenggara urusan Pemerintah dibidang Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dijabarkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 42 Tahun 2016. Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar berada dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok:

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan dan Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT.
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan Administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
- c. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Kampar yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilakukan dengan mengacu kepada Dokumen Perencanaan yang dimiliki. Program dan kegiatan Tahun 2018 mengacu pada Dokumen Renja (Rencana Kerja) Tahun 2018 dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2017-2021. Program Pembangunan kesehatan di Kabupaten Kampar yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten bersama jajaran kesehatan tidak akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya tanpa keterlibatan dari sektor lain yang terkait, peran lintas sektor dan swasta serta masyarakat umumnya. Bila dikoordinasikan dengan baik secara sinergis maka apa yang menjadi visi kabupaten Kampar dapat tercapai.

4.4 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar

Gambaran Kabupaten Kampar masa depan yang ingin dicapai melalui Pembangunan Kesehatan adalah suatu kondisi dimana masyarakat Kabupaten Kampar menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi. Dengan kondisi yang demikian masyarakat dapat bebas dari gangguan kesehatan baik yang disebabkan karena penyakit, termasuk gangguan kesehatan akibat bencana maupun akibat lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung hidup bersih dan sehat. Sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh pelosok Kabupaten Kampar. Gambaran masyarakat Kabupaten Kampar dimasa depan tersebut merupakan VISI Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kampar yang juga merupakan Visi Kabupaten Kampar, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai wilayah industri dan pertanian yang maju dengan masyarakat yang religius, beradab, berbudaya dan sejahtera” Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar menyadari bahwa kedepan dengan pernyataan Visi tersebut,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diperlukan langkah dan strategi antisipatif dan inovatif untuk mewujudkannya. Visi tersebut juga menunjukkan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah dalam Bidang kesehatan. Penetapan visi tersebut juga merupakan motivasi utama bagi jajaran Kesehatan mewujudkan sasaran Pembangunan di Kabupaten Kampar khususnya Pembangunan sektor kesehatan.

4.5 Uraian Tugas Jabatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar

Adapun uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Kesehatan Kab.Kampar sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Dinas Kesehatan Kab.Kampar

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - 2.1 Sub Bagian Program, Informasi & Hubungan Masyarakat
 - 2.2 Sub Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum
 - 2.3 Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
3. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - 3.1 Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
 - 3.2 Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 3.3 Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga
4. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
 - 4.1 Seksi Surveilans dan Imunisasi
 - 4.2 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - 4.3 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan

- 5.1 Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional
- 5.2 Seksi Pelayanan Rujukan
- 5.3 Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

- 6.1 Seksi Kefarmasian, Alat kesehatan dan PKRT
- 6.2 Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana
- 6.3 Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti menyimpulkan terkait dengan Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Kampar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar belum optimal, hal ini dikarenakan oleh beberapa aspek, yaitu pertama, komunikasi dalam mensosialisasikan masih kurang maksimal sehingga sosialisasi belum tersampaikan kepada seluruh masyarakat di setiap daerah, kurang jelasnya penyampaian informasi maka menyebabkan tidak konsistennya untuk mencapai tujuan kebijakan. Kemudian yang kedua adalah aspek sumber daya, sumber daya staf yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar masih kurang kuantitas dan kualitas pegawai, tetapi sumber daya sarana dan prasarana sudah memadai. Selanjutnya sikap pelaksana bahwa penempatan pegawai atau staf masih kurang memperhatikan kapasitas sehingga sikap yang ditunjukkan oleh pelaksana belum optimal, dan tidak adanya reward seperti pemberian intensif terhadap pelaksana kebijakan penurunan stunting membuat kurangnya motivasi dalam bekerja. kemudian dalam struktur birokrasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar berdasarkan hasil dilapangan maka penulis dapat mendeskripsikan bahwa SOP dalam pelaksanaan program bulan sadar pajak belum terlaksana sepenuhnya, dan tidak ada tanggung tanggung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab dari setiap staf yang ada karena tidak ada penunjukan tim khusus yang berkoordinasi dalam melaksanakan kebijakan penurunan stunting.

6.2.2 Saran

Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten kampar sebagaimana simpulan diatas masih belum terlaksana secara baik dan optimal, maka penulis menyarankan:

- a. Untuk Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar agar terlaksana secara optimal maka Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar sebaiknya mengadakan sosialisasi langsung ke setiap daerah-daerah yang ada di kabupaten kampar secara bertahap. Untuk mensosialisasikannya lebih baik membentuk tim khusus agar ada tanggung jawab dari setiap staf yang ditunjuk sebagai pelaksana program bulan sadar pajak. Pengangkatan anggota atau staf harus yang berkompeten atau berkualitas sehingga mampu memaksimalkan pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Kampar.



DAFTAR PUSTAKA

- ACC/SCN. 2000. *The World Nutrition Situation. Nutrition Throughout the life Cichle*.Ganeva:WHO
- Aryastami, N. K. (2017). Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia.*Buletin Penelitian Kesehatan*, 45(4), 233–240.
- Ayuningtyas, D. (2014). *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Ayuningtyas, D. (2018). *Analisis Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Aplikasi* (1st ed.). Depok: Rajawali Pers
- Buku Ringkasan Stunting 100 KABUPATEN/KOTA PRIORITAS UNTUK INTERVENSI ANAK Kerdil (STUNTING) dari Dinas Kesehatan
<https://doi.org/10.22435/bpk.v45i4.7465.233-240>
<https://kalam.sindonews.com/ayat/233/2/al-baqarah-ayat-233>
<https://kalam.sindonews.com/ayat/9/4/an-nisa-ayat-9>
- Husein, Umar, 1999. *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia dalam Prespektif Administrasi Publik.*Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*,1(2).
- Makmur hermanto, 2013.*Pengantar Analisis Kebijakan Public*. (penyunting Darwin Muhajir). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Morissan. 2008. *Manajemen public relations: Strategi menjadi Humas Profesional*. Jakarta: Kencana Prenada Media group.
- PEDOMAN PELAKSANAAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN/ KOTA.Edisi November 2018
- PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 44 TAHUN 2019
- PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2013
- Siagian Sondang, P. 2015. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widianto, bambang.2018.*Panduan kovegerensi program / kegiatan percepatan pencegahab stunting, Buku pegangan Resmi Organisasi Perangkat Daerah*. Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau, State Islamic University of Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. A. RahmanSaleh No. 22 Telp. (0762) 20211 – 20133 Fax. (0762) 21047
BANGKINANG

KODE POS: 28411

SURAT REKOMENDASI Nomor :440/DINKES/SDK-1/2021/41

Dasar : Surat Rekomendasi surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Nomor: 070/BKBP/2021/501 Tanggal 07 Juli 2021

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : **dr. ZULHENDRA DAS'AT**
NIP : 19750609 200312 1 008
Pangkat/Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Kabid SDK dan Kefarmasian

Memberi Rekomendasi Kepada :

Nama : **Erina Fahzira**
NIM : 111775201257
Universitas : Univeristas Islam Negeri Suska Riau
Program Studi : S-1 Ilmu Administrasi Negara

Untuk melakukan Penelitian dan Pengumpulan data di Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab.Kampar Dengan Judul "Implementasi Kebijakan Penurunan Stanting di Kabupaten Kampar", sebagai persyaratan menyelesaikan Skripsi di Program Studi S-1 Ilmu Administrasi Negara UIN Suska Riau di Pekanbaru dengan mentaati seluruh ketentuan yang berlaku. Diharapkan kepada saudara melaporkan hasil penelitiannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kampar melalui Seksi SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Kampar.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 08 Juli 2021

An. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KAMPAR
Kabid SDK & Kefarmasian



dr. ZULHENDRA DAS'AT
NIP. 19750609 200312 1 008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2358/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 08 April 2021 M
25 Sya'ban 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

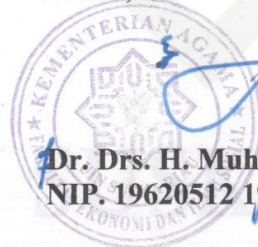
Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Erina Fahzira
NIM. : 11775201257
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"**Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar**"
Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang
diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang menyalin atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/2419/2021 Pekanbaru, 12 April 2021 M
Sifat : Biasa 29 Sya'ban 1442 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Mhd. Rafi, S.Sos., M.Si.**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : Erina Fahzira
NIM : 11775201257
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul: "**Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA
NIP 19751112 199903 2 001

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/501

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2358/2021 tanggal 8 April 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama : ERINA FAHZIRA
2. NIM : 11775201257
3. Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
4. Program Studi : ILMU ADMISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : BANGKINANG
7. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STANTING DI KABUPATEN KAMPAR
8. Lokasi : DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 07 Juli 2021

an. KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR
Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,


ONNITA, SE
Penata Tk. I
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/42147
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2358/2021 Tanggal 8 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

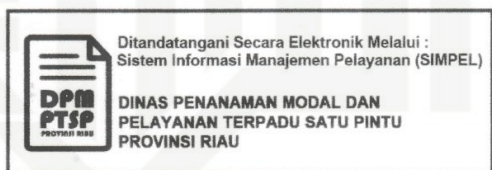
- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ERINA FAHZIRA |
| 2. NIM / KTP | : | 11775201257 |
| 3. Program Studi | : | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | BANGKINANG |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STANTING DI KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Juni 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PEBULIS



Penulis bernama ERINA FAHZIRA lahir di Kota Bangkinang, 17 Juni 1999. Anak pertama Tunggal, dari pasangan bapak H.Irpunia dan Ibu Dewi Hastuti. Mengawali pendidikan di taman Kanak-kanak (TK) Pembina tamat pada tahun 2005. Pada tahun 2011 penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 004 Bangkinang, kemudian pada tahun 2014 penulis telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di Pesantren Babussalam pekanbaru dan pada tahun 2017 penulis telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di Pesantren Babussalam Pekanbaru. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau dengan mengambil Prodi Ilmu Administrasi Negara S1 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial melalui jalur Undangan.

Adapun riwayat lain yang penulis tempuh , yaitu melakukan magang di Dinas Kesehatan Bangkinang jalan Dr. Arahman Saleh pada tahun 2020. Kemudian penulis melakukan KKN di Bangkinang, Kabupaten Kampar, Desa Kumantan

Atas berkat dan rahmat Allah SWT serta do`a dan dukungan orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul “ Implementasi Kebijakan Penurunan Sytunting Di Kabupaten Kampar” pada tanggal, 17 November 2021 di bawah bimbingan Bapak Mhd.Rafi, S.Sos.,M.Si. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial pada hari Rabu tanggal, 17 November 2021 M/ 1443 H, penulis dinyatakan “LULUS” dengan predikat “Memuaskan” dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.